

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI GURU ATAS TINDAKAN PEMBERIAN HUKUMAN TERHADAP SISWA

Oleh:

Abdul Rahman Prakoso dan Rinaldi Hermawan

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah

Abdulprakoso27@gmail.com / hermawanrinaldi@gmail.com

Abstrak

Kunci utama terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas dalam bidang pendidikan ialah Guru. Guru saat menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan nilai-nilai dasar kehidupan bernegara. Pendidikan sebagai bagian tahapan dalam kehidupan yang dilalui oleh penerus bangsa untuk meneruskan perjuangan-perjuangan mewujudkan cita-cita pembentuk bangsa. Guru sebagai Orang tua ketika siswa berada di sekolah untuk menuntut ilmu pengetahuan.

Fenomena perilaku siswa yang tidak mematuhi perintah guru perlu memperoleh teguran agar tidak mengulangi perilaku tersebut. Namun hal tersebut belum tentu dilaksanakan oleh siswa. Ada beberapa siswa yang bukannya mematuhi perintah tersebut, tetapi kembali memberontak kepada guru dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kedudukannya sebagai siswa di sekolah. Hal tersebut terkadang membuat siswa seolah-olah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding guru. Guru sebagai tenaga pendidik untuk memberikan penyampaian ilmu kepada siswa tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi juga karakter.

Pendidikan karakter diperlukan agar siswa mempunyai perilaku yang benar sesuai dengan posisinya sebagai peserta didik. Perlindungan guru dalam memberikan pengajaran kepada siswanya saat ini sangat diperlukan. Mengingat ada beberapa kejadian yang membuat guru seolah-olah tidak dihormati oleh para siswanya bahkan orang tua siswa itu sendiri. Maka dari di perlukan kajian terkait dengan perlindungan profesi guru terhadap tindakan peneguran siswa.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Profesi Guru, Siswa

I. Pendahuluan

Pendidikan tidak bisa dilepaskan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal yang pertama dilakukan manusia ketika lahir ialah belajar menangis. Bahkan kalau tidak menangis dipaksa untuk menangis agar kelahiran yang diinginkan secara normal. Hal yang lain ketika belajar untuk berdiri, jatuh bangun pun dilakukan dan diajari oleh orang tua untuk berlatih berjalan dengan memegang kedua tangan orang yang mengajari atau dengan berpegangan pada meja.

Pendidikan sebagai kunci dalam dalam peradaban suatu bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke empat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Terdapat cita-cita yang besar dari dasar pembukaan ini pendidikan sebagai salah satu hal utama untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Tanpa pendidikan yang sesuai dengan jati diri bangsa tidak akan mungkin tujuan pencapaian pendidikan tidak akan terpenuhi. Sebagai kunci kemajuan bangsa diukur dari salah satunya kemajuan pendidikan yang dimiliki oleh bangsa tersebut.

Anggapan dunia pendidikan yang kompleks dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai moralitas. Saat ini hal tersebut hampir memudar dengan berbagai masalah pendidikan yang ada seiring berkembangnya dinamika kehidupan masyarakat. Sebaliknya, dunia pendidikan saat ini memiliki masalah yang cukup kompleks, baik masalah internal dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri, maupun masalah eksternal, sehingga dapat menghambat tujuan pendidikan yang akan dicapai. Pihak internal tentunya adalah komponen yang terkait langsung dengan dunia pendidikan. Sedangkan, pihak eksternal adalah semua pihak tidak terkait langsung dalam dunia pendidikan, misalnya masyarakat luas. Fenomena penyimpangan dalam dunia pendidikan dapat digolongkan sebagai pelanggaran biasa maupun tindak pidana.

Seseorang yang melanggar hukum adalah salah satu sebab akibat dari ketidakdisiplinan

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1

dalam belajar, dalam bekerja, menggunakan waktu, menggunakan anggaran belanja maupun dalam mentaati norma hukum yang berlaku. Negara kita adalah negara hukum (*recht staat*) karena segala sesuatu yang menyangkut aspek kehidupan manusia di atur dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, sedangkan tujuan hukum yang dibuat oleh lembaga penegak hukum maupun lembaga pemerintah adalah, agar masyarakat tertib, rukun, aman, dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah siswa maupun guru dan karyawan tata usaha sekolah sebagian besar kurang disiplin, dalam hal ini kita sebagai warganegara perlu menyadari dan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku, sesuai dengan dasar negara, yaitu negara adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan yang absolut, oleh karena setiap warganegara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang berdaulat, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke- 4 Pasal 27 ayat (1), menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.²

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini dinilai melanggar HAM. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi dia harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah. Para siswa siswa nakal tersebut dibiarkan saja, dari pada nantinya guru terkena masalah hukum. Ketidaktegasan guru berdampak terhadap semakin rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, khususnya di kalangan siswa-siswa yang nakal. Mereka semakin seenaknya melanggar tata tertib sekolah, karena toh tidak akan dihukum.³

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlu diketahui bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip, salah satunya adalah memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.⁴ Disamping itu, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas adalah salah satu hak yang diperoleh guru dalam melaksanakan tugas

² Minal Ardi, “Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Disiplin Siswa Dalam Belajar(Penelitian eksperimen di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang”, *Jurnal Eksos*, Vol. 8, Nomor 1, Februari 2012, hlm. 61.

³ Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, “Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas”, *Jurnal Baliresa*, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2017, hlm. 116.

⁴ Pasal 7 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

keprofesionalan.⁵

II. Guru sebagai profesi yang mulia

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁶ Guru memiliki tugas yang mulia untuk membantu peserta didik sebagai fasilitator dalam mencapai cita-cita kehidupan. Tidak hanya dalam pendidikan ilmu pengetahuan namun juga dalam pendidikan moral. Mengingat kedua hal itu saling terkait satu sama lain agar tercapai kondisi yang seimbang antara kecerdasan dengan perilaku yang dilakukan.

Sesungguhnya, seorang guru mempunyai multi peranan yang sangat penting dalam kesuksesan pendidikan. Gurulah yang menjadi ujung tombak dari keberhasilan pendidikan pada tataran operasional. Guru juga yang senantiasa berada pada baris terdepan pendidikan yang berhadapan secara langsung dengan peserta didik melalui proses interaksi instruksional sebagai wahana proses pembelajaran siswa dalam nuansa pendidikan.⁷

Seorang guru dalam memberikan pengajaran dituntut memiliki tindakan profesional, kompeten untuk mendukung pembelajaran yang optimal. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁸ Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
- b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia

⁵ Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, “Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa... hlm. 116.

⁶ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

⁷ Muhammad Surya, *Percikan Perjuangan Guru*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 56.

⁸ Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

⁹ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

- c) Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas.
- d) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- e) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
- f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
- g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
- h) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
- i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.¹⁰

Pada bagian awal Keputusan Kongres PGRI ke XXI/ PGRI/ 2013 No. VI/Kongres/XXI/ PGRI/ 2013 tentang Kode Etik Guru Indonesia, mengajak pada semua pihak bahwa pendidikan adalah infra struktur masyarakat Indonesia. Dan profesi Guru adalah sebagai pendidik profesional dan sangat dihormati dan di muliakan dalam struktur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu moralitas guru harus senantiasa terjaga mengingat bahwa martabat dan kemuliaannya adalah merupakan unsur dasar dan keunggulannya terletak pada perilaku, akal budi, dan pengabdianya.

Pemberian hukuman di sekolah merupakan pembentukan sikap dan perilaku siswa di sekolah agar patuh dan taat terhadap semua aturan atau kaedah/norma hukum yang ada. Hukuman atau sanksi yang diberikan oleh guru di sekolah adalah sebagai alat untuk mendidik dan membina para siswa, agar insyaf dan jera terhadap perlakuan atau perbuatan yang dilanggarnya.

Hukuman adalah tindakan terakhir yang dilakukan jika teguran dan peringatan belum mampu mencegah siswa untuk tidak melakukan pelanggaran misalnya, jika tidak mengikuti upacara setiap senin akan diberi hukuman berlari mengelilingi lapangan atau tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dikenai hukuman.¹¹

Meningkatnya berbagai permasalahan yang menimpa guru telah menyudutkan profesi terhormat dari guru. Tindakan-tindakan guru kepada peserta didik, dalam kerangka mendidik terkadang diterima “salah” oleh orang tua peserta didik dan merupakan perbuatan yang tidak termaafkan sehingga harus diselesaikan dengan tindak kekerasan bahkan sampai ke meja hijau. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok “profesional” dari bidang lain guna mengambil

¹⁰ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

¹¹ Aim Abdulkarim, *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis untuk Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*, (Bandung: Grapindo Media Pratama, 2007), hlm. 24.

keuntungan pribadi dengan melakukan “*blow up*” besar-besaran melalui berbagai media.

III. Peranan Organisasi Profesi Guru

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merupakan sebuah perkumpulan berbadan hukum yang didirikan dan di urus oleh guru sebagai wadah untuk mengembangkan profesionalisme, memperjuangkan perlindungan hukum, dan perlindungan keselamatan kerja serta menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggotanya.

PGRI mempunyai peranan strategis dalam reformasi pendidikan nasional kepada anggotanya, PGRI berperan dan bertanggung jawab serta memperjuangkan dalam upaya mewujudkan serta melindungi hak-hak asasi dan martabat guru khususnya dalam aspek profesinya dan kesejahteraannya. Sebagai Organisasi profesi PGRI juga ingin mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang, dan satuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peran serta dalam pembangunan nasional. Dalam hal ini PGRI juga harusnya mampu untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan atau organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan.¹²

Keberadaan organisasi profesi keguruan, adalah merupakan suatu keharusan profesional yang sangat diperlukan. Peran melindungi dan mengayomi bahkan ketika guru dianggap tidak profesional dalam melaksanakan profesinya, organisasi profesilah harus tampil lebih di awal untuk melakukan evaluasi dan verifikasi. Karena organisasi profesilah yang lebih berkompeten melakukan evaluasi dan verifikasi. Uji profesional guru dan profesi yang lain hanya mungkin dilakukan oleh pihak yang memahami dan mendalami profesi tersebut. Organisasi profesilah yang seharusnya membina dan melindungi dengan memakai pendekatan kode etik profesi keguruan. Yang didalamnya terdapat perangkat profesional dan mandiri yang menjalankan peran tersebut, yakni Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI).¹³

Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI) adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, penegakan, dan pelanggaran disiplin organisasi dan etika profesi guru. Peraturan tentang Dewan Kehormatan Guru Indonesia adalah pedoman pokok dalam mengelola Dewan Kehormatan

¹² Ni Luh Emi Puspini, dkk, “Perlindungan Hukum Organisasi Persatuan Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia Terhadap Profesi Guru Dalam Tindak Pidana Pendidikan di Kabupaten Bangli”, *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, Nomor 5, 2013, hlm. 6.

¹³ Harun, “Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Perspektif Hukum Positif”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 1 Nomor 1, Oktober 2016, hlm. 74.

Guru Indonesia, dalam hal penyelenggaraan tugas dan wewenang bimbingan, pengawasan, dan penilaian Kode Etik Guru Indonesia.¹⁴

Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 42, Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

- a) Menetapkan dan menegakkan kode etik guru
- b) Memberikan bantuan hukum kepada guru
- c) Memberikan perlindungan profesi guru
- d) Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru
- e) Memajukan pendidikan nasional.

Optimalisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berada dibawah naungan PGRI diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memberikan perlindungan terhadap guru yang tengah menghadapi permasalahan hukum. Peranan organisasi profesi guru memiliki peranan penting untuk memberikan perlindungan dan pembinaan profesi guru.

IV. Kebijakan Pemerintah terhadap Upaya Perlindungan hukum Profesi Guru

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Menurut C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁵

Perlindungan hukum sangatlah diperlukan bagi guru sebagai pendidik agar terlindungi haknya. Dalam KUHP, pemeriksaan kasus tindak pidana harus dilaksanakan dengan memahami manusia dan kemanusiaan, yang wajib dilindungi harkat martabatnya. Walaupun tujuan penegak hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegak hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa. Sebaliknya, perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 102.

KUHAP sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum.¹⁶

Maraknya berbagai kasus yang menimpa guru dalam menjalankan tugas profesinya merupakan salah satu bukti bahwa Perlindungan hukum terhadap profesi guru belum berjalan dengan benar. Guru sebagai profesi yang mulia/terhormat, sebagaimana profesi-profesi lainnya, rupanya belum dipahami benar oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya aparat penegak hukum yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah.¹⁷

Para guru tersebut biasanya diadukan ke aparat kepolisian oleh orang tua muridnya karena melanggar Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA). UUPA seolah menyandera dan alat untuk melakukan kriminalisasi bagi guru. Pasal andalan yang dijadikan rujukan dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap anak oleh guru adalah Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Adapun jenis-jenis kekerasan tercantum pada pasal 69, yaitu kekerasan fisik, psikis, dan seksual.¹⁸

Kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, terutama diletakkan pada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kewajiban itu dimulai dengan menyediakan peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah sebagai payung hukum bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan bentuk-bentuk kebijakan yang tepat dan sesuai dengan hak yang harus diterima oleh guru.¹⁹

Pemerintah pusat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan utama atau dasar hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap guru.²⁰

Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan

¹⁶ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 374-375.

¹⁷ Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, “Penyuluhan Perlindungan Hukum...”, hlm. 121.

¹⁸ Ibid., hlm. 121.

¹⁹ Minal Ardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Guru...”, hlm. 175.

²⁰ Ibid.,

dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 huruf g “Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas” dan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Dalam ayat 1 “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Dalam Ayat 2 Perlindungan yang dimaksud meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam ayat 3 dijelaskan perlindungan hukum mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Sehingga secara legalitas upaya jaminan perlindungan terhadap guru ini sudah terpenuhi dalam peraturan perundang-undangan namun dalam hal ini masih di perlukan pemahaman hukum agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai keadilan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga kependidikan ini merupakan wujud upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan yang didapatkan oleh guru dan tenaga kependidikan meliputi perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja dan hak atas kekayaan intelektual. Dengan permendikbud ini akan lebih memberikan jaminan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugasnya.

V. Kesimpulan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tanpa pendidikan yang sesuai dengan jati diri bangsa tidak akan mungkin tujuan pencapaian pendidikan tidak akan terpenuhi. Sebagai kunci kemajuan bangsa diukur dari salah satunya kemajuan pendidikan yang dimiliki oleh bangsa tersebut.

Guru memiliki tugas yang mulia untuk membantu peserta didik sebagai fasilitator dalam mencapai cita-cita kehidupan. Tidak hanya dalam pendidikan ilmu pengetahuan namun juga dalam pendidikan moral. Mengingat kedua hal itu saling terkait satu sama lain agar tercapai kondisi yang seimbang antara kecerdasan dengan perilaku yang dilakukan. Amanah yang dipegang oleh guru untuk membantu membentuk peradaban bangsa yang lebih baik diwujudkan dengan memberikan pengajaran kepada peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru.

Organisasi profesi guru sebagai wadah perkumpulan untuk mengembangkan profesionalisme, memperjuangkan perlindungan hukum, pembinaan dan perlindungan keselamatan kerja serta menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggotanya. Optimalisasi organisasi profesi guru memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan harkat dan martabat profesi guru.

Perlindungan profesi guru saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017. Di era saat ini masih banyak tindakan kekerasan oleh siswa ataupun orang tua kepada Guru. Jaminan peraturan yang ada belum mampu untuk melindungi guru dari ancaman ranah tindak pidana.

VI. Daftar Pustaka

- Abdulkarim, Aim, *Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga Negara yang Demokratis untuk Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*, Bandung: Grapindo Media Pratama, 2007.
- Ardi, Minal, , *Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Disiplin Siswa Dalam Belajar (Penelitian eksperimen di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang)* Jurnal Eksos, Vol. 8, Nomor 1, Februari 2012. <http://repository.polnep.ac.id/xmlui/handle/123456789/359>
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Harun, *Perlindungan Hukum Profesi Guru dalam Perspektif Hukum Positif*, Jurnal Law and Justice, Vol. 1 Nomor 1, Oktober 2016. <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/2858>
- Ni Luh Emi Puspini, dkk, *Perlindungan Hukum Organisasi Persatuan Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia Terhadap Profesi Guru Dalam Tindak Pidana Pendidikan di Kabupaten Bangli*, Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan, Vol. 1, Nomor 5, 2013. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/927>

O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni, 2006.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Surya, Muhammad, *Percikan Perjuangan Guru*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003

Umardani, Muhammad Kharis & Liany, Lusy, *Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas*, Jurnal Baliresa, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2017. <http://jurnal.umi.ac.id/index.php/lpmd/article/view/34/20>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4586)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional